

Pengaruh E-Procurement dan Profesionalisme Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Dampaknya Pada Implementasi Tatakelola Sektor Publik (Survey Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Ferry Fiardani Taufik*, Agustin Fadjarenie

Universitas Mercu Buana

*e-mail: ferryfiardani@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan rutin yang vital dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh dunia. Mengingat besarnya alokasi APBN untuk kegiatan ini, pengelolaan yang efektif dan efisien menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh e-Procurement dan profesionalisme terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa serta dampaknya pada tata kelola sektor publik. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 160 Pejabat Pengelola Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan, dilengkapi dengan wawancara semi terstruktur. Hasil studi menunjukkan bahwa e-Procurement dan profesionalisme berdampak positif dan signifikan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa, yang selanjutnya berpengaruh positif terhadap tata kelola sektor publik. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan SOP pengadaan, terutama dalam pengendalian internal proses perekaman pengadaan insidental, serta pembangunan Knowledge Management System. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tata kelola sektor publik, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas sistem pengadaan pemerintah, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak positif pada pembangunan ekonomi nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dianalisa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari akuntabilitas terhadap sistem pengadaan barang/jasa di sektor public. Pada penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel transparansi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci : e-Procurement, Profesionalisme, Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kelola Sektor Publik.

ABSTRACT

Procurement of goods and services is a vital routine activity in supporting economic development and achieving Sustainable Development Goals (SDGs) worldwide. Given the significant allocation of the state budget for this activity, effective and efficient management is crucial. This research aims to empirically demonstrate the influence of e-Procurement and professionalism on the effectiveness of goods and services procurement and its impact on public sector governance. Using a quantitative method with a survey approach, data was collected through questionnaires distributed to 160 Procurement Management Officials within the Ministry of Finance, supplemented by semi-structured interviews. The study results show that e-Procurement and professionalism have a positive and significant impact on the effectiveness of goods and services procurement, which in turn positively influences public sector governance. The implications of this research indicate the need for improvements in procurement SOPs, especially in internal control of incidental procurement recording processes, as well as the development of a Knowledge Management System. This research not only contributes to the development of public sector governance theory but also offers practical solutions to enhance the effectiveness of government procurement systems, which is expected to serve as a reference for policymakers in designing strategies to improve the quality of government goods and services procurement, positively impacting national economic development and the achievement of sustainable development goals. Based on the results of the

research conducted, it can be analyzed that there is a positive and significant influence of accountability on the goods/services procurement system in the public sector. This research also concludes that there is a positive and significant influence between the transparency variable on the goods and services procurement system.

Keywords: *E-Procurement, Professionalism, Effective Procurement, Public Sector Governance*

PENDAHULUAN

Perkembangan terkini di bidang akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, telah menjadi suatu bidang ilmu yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) yaitu pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Pramono, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak semua negara untuk bersama-sama mewujudkan arah pertumbuhan ekonomi Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. SDGs merupakan seruan bagi seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan demi mengakhiri kemiskinan, melindungi iklim planet bumi, dan memastikan seluruh dunia mencapai perdamaian serta kemakmuran pada tahun 2030. Untuk mencapai SDGs, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Poghosyan et al., 2020).

Efektivitas pengelolaan keuangan negara merupakan fokus utama pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk program pembangunan (Aulia *et al*, 2024). Efektivitas pengelolaan keuangan negara juga menjadi penting dalam upaya mobilisasi pendapatan nasional dan efisiensi ekonomi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara. Sistem pengelolaan keuangan negara yang efisien meliputi pengaturan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara melalui penganggaran dan perencanaannya serta efektivitas otorisasi dari eksekutif dan legislatif, terutama dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah (Public Procurement).

Pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah menjadi sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara (Zulkarnaen, et al., 2020). Di seluruh dunia, negara-negara menghabiskan dana belanja pemerintah sebesar \$95 triliun setiap tahun untuk pembangunan sekolah, pembelian perlengkapan rumah sakit, pembaruan armada bus kota, pembangunan jalan, dan pengamanan sistem kesehatan. Negara-negara berkembang rata-rata menghabiskan \$820 miliar per tahun untuk belanja barang dan jasa (World Bank, 2019). Menurut Methodology for Assessing Procurement System (MAPS) Initiative, pengadaan barang atau jasa pemerintah di negara-negara dunia menghabiskan 6-20% dari anggaran belanja pemerintah setiap tahunnya. Di Indonesia, pada tahun 2020, pengadaan barang dan jasa mencapai 40% dari APBN, sekitar 940 triliun rupiah, dengan alokasi terbesar pada sektor infrastruktur (OECD, 2020).

Sistem pengadaan publik yang efektif dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan pada anggaran belanja barang dan jasa, dan lebih siap untuk mengundang investasi swasta (Darmawan, 2022). Menurut Pratama (2022) penguatan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi tahun 2021. Jika pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara tepat, dapat berdampak pada keberlanjutan, inovasi, dan kebijakan lainnya. Dengan demikian, penguatan sistem pengadaan publik sangat penting untuk mencapai hasil yang nyata dan berkelanjutan serta untuk membangun institusi yang efektif

(Arianto, 2020). Namun, pengadaan barang/jasa di Indonesia sering dirusak dengan adanya proses yang tidak efisien dan implementasi akuntabilitas dan transparansi (Robbani dan Nadhif, 2024).

Namun, secara global, pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah area dengan risiko korupsi terbesar. Pengadaan barang atau jasa pemerintah menghabiskan 15-30% dari PDB di banyak negara. Menurut panduan UNODC tentang Anti-Korupsi dalam Pengadaan Publik, kerugian negara akibat korupsi mencapai 10-25% dari nilai kontrak yang dapat mencapai ratusan miliar dolar per tahun secara global. Hal ini selaras dengan pendapat Tipuludji (2016) mayoritas negara di dunia ini menghabiskan dana untuk pengadaan barang/jasa hingga mencapai 10%-30% dari total anggaran. Nilai transaksi pengadaan barang/jasa di negara-negara Uni Eropa mencapai 16% dari GDP, sedangkan Amerika Serikat mencapai 16% dari GDP. Sementara di negeri kita, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sekitar 31,2% atau sekitar Rp327 triliun diperuntukkan bagi belanja barang/jasa pemerintah. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa untuk mengatasi hal tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian Keuangan. Data menunjukkan Kementerian Keuangan termasuk dalam sepuluh besar kementerian/lembaga dengan belanja barang dan jasa terbesar, menduduki urutan kedelapan dengan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp6.157.914.542.247.

Fenomena pengadaan barang dan jasa pemerintah di dunia menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa di negara berkembang, seperti kurangnya implementasi e-Procurement, keterlambatan pembayaran kepada pihak swasta, dan mekanisme laporan keluhan publik yang tidak optimal (World Bank, 2019). Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) oleh Transparency International, Indonesia memiliki skor CPI yang fluktuatif selama satu dekade terakhir. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai cara untuk melawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk menerapkan sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement). Namun, penerapannya masih berjalan lambat karena hanya 30% dari total anggaran pengadaan barang dan jasa yang terealisasi menggunakan sistem e-Procurement (Transparency International, 2017). Indonesian Corruption Watch (ICW) berpendapat bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia belum efektif. ICW menemukan bahwa implementasi e-Procurement di Indonesia sangat terdesentralisasi dan kompleks, dengan data pengadaan barang dan jasa diinput di 689 LPSE yang berbeda, menyebabkan informasi tidak tersedia pada satu titik melainkan tersebar di berbagai platform.

Sebagai sebuah sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, e-Procurement memiliki potensi untuk meningkatkan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsif, keadilan, inklusif, efektif, efisien, ketaatan terhadap peraturan, partisipasi, dan berorientasi pada persetujuan umum (UCLG Asia-Pacific, 2021). Sistem ini diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, di mana seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan dengan bantuan sistem elektronik. Pemerintah Indonesia melalui LKPP telah mengembangkan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa yang dikenal sebagai e-Procurement. Langkah ini bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta sebagai cara pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan e-Procurement, interaksi langsung antara pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan dapat diminimalkan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi e-Procurement memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di sektor publik maupun swasta (Mutangili, 2019; Butt, 2020; Clark et al., 2012). Sebagian besar kasus korupsi di Indonesia berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan kerugian negara akibat korupsi mencapai \$4 miliar USD per tahun (UNODC, 2020). Menurut data KPK (2004-2019), sekitar 70% kasus yang ditangani oleh KPK melibatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan 65% di antaranya melibatkan suap. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah penyimpangan barang dan jasa terjadi karena tidak profesionalnya pelaku pengadaan. Profesionalisme pelaku pengadaan merupakan kunci penting dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif. Menurut Kenneth Lyons (2020), pengadaan barang dan jasa adalah profesi yang

didasarkan pada pengetahuan terhadap teori, pelatihan yang lama, dan edukasi. Kompetensi berdasarkan hasil ujian dan ketaatan terhadap kode etik profesi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh implementasi e-Procurement dan profesionalisme terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa serta dampaknya terhadap tata kelola di sektor publik, khususnya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh e-Procurement dan profesionalisme terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa serta dampaknya pada tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis kuantitatif. Populasi penelitian adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Keuangan. Sampel diambil dengan teknik sampling acak sederhana. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarikan kepada 160 responden dan telah diuji validitas serta reliabilitasnya untuk mengukur variabel E-Procurement, Profesionalisme, dan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: analisis deskriptif karakteristik responden menggunakan tabel distribusi frekuensi, analisis deskriptif variabel penelitian menggunakan rata-rata tanggapan responden, dan analisis Partial Least Square (PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9. PLS digunakan karena mampu mengatasi masalah ketidaknormalan data dan cocok untuk sampel kecil. Variabel penelitian terdiri dari E-Procurement, Profesionalisme, dan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pengukuran berdasarkan indikator yang relevan. Pengujian hipotesis menggunakan nilai p-value dan t-hitung, di mana hipotesis H_a diterima jika $p\text{-value} < 0.05$ dan $t\text{-hitung} > 1.65$, menunjukkan pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-Procurement dan profesionalisme terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dampaknya pada implementasi Tata Kelola di Sektor Publik. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 160 responden yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tabel 1. Deskripsi Gambaran profesionalisme di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Jawaban Responden					Total	Skor	Rata-rata
Indikator	S	HS	N	HTS	TS			
X2.1	24	44	20	39	33	160	486	3,04
X2.2	17	40	23	28	52	160	427	2,67
X2.3	32	41	22	29	36	160	491	3,07
X2.4	38	41	22	28	31	160	513	3,21
X2.5	25	38	20	38	39	160	508	3,18
X2.6	23	43	21	35	38	160	472	2,95
Rata-rata								3,02

Dapat dilihat table 1 bahwa secara umum respon responden terhadap variabel profesionalisme dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari besarnya nilai rata-rata variabel profesionalisme di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 3,02 termasuk dalam kategori sedang (2,34-3,67). Hal ini sesuai dengan tingkat efektivitas diukur

menggunakan indikator yang merujuk pada *Brooke* (2013: 29-40) sebagaimana dijabarkan dalam (Syamsuddin, 2019), di mana kategori efektivitas sedang jika berada di rentang 2,34 - 3,67.

Tabel 2. Gambaran Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Jawaban Responden					Total	Skor	Rata-rata
Indikator	S	HS	N	HTS	TS			
Y1	58	34	12	27	29	160	415	2,59
Y2	40	39	12	29	40	160	470	2,94
Y3	52	31	26	18	33	160	429	2,68
Y4	32	39	30	22	37	160	473	2,96
Y5	34	43	18	30	35	160	469	2,93
Y6	49	36	7	34	34	160	448	2,80
Y7	34	36	24	28	38	160	480	3,00
Y8	30	53	26	28	23	160	519	3,24
Y9	41	40	13	30	36	160	460	2,88
Y10	42	49	13	33	23	160	534	3,34
Rata-rata								2,94

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa secara umum respon responden terhadap variabel efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari besarnya nilai rata-rata variabel efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 2,94 termasuk dalam kategori sedang (2,34-3,67). Hal ini sesuai dengan tingkat efektivitas diukur menggunakan indikator yang merujuk pada *Brooke* (2013: 29-40) sebagaimana dijabarkan dalam (Syamsuddin, 2019), di mana kategori efektivitas sedang jika berada di rentang 2,34 - 3,67.

Tabel 3. Gambaran Implementasi Tata Kelola di Sektor Publik di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Jawaban Responden					Total	Skor	Rata-rata
Indikator	S	HS	N	HTS	TS			
Z1	33	51	25	26	25	160	522	3,26
Z2	44	42	19	34	21	160	549	3,43
Z3	35	51	26	34	14	160	547	3,42
Z4	40	44	27	29	20	160	537	3,36
Z5	29	48	27	32	24	160	511	3,19
Z6	37	47	22	39	15	160	549	3,43
Z7	36	49	24	24	27	160	437	2,73
Rata-rata								3,26

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa secara umum respon responden terhadap variabel implementasi Tata Kelola di Sektor Publik (Z) dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari besarnya nilai rata-rata variabel implementasi Tata Kelola di Sektor Publik (Z) di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 3,26 termasuk dalam kategori sedang (2,34-3,67). Hal ini sesuai dengan tingkat efektivitas diukur menggunakan indikator yang merujuk pada Brooke (2013: 29-40) sebagaimana dijabarkan dalam (Syamsuddin, 2019), di mana kategori efektivitas dibagi menjadi sedang jika berada di rentang 2,34 - 3,67.

Tabel 4. Nilai Path Coefficient, t-Statistics, dan P-Values

Hubungan antar Konstruk	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Pengaruh Langsung				
E-Procurement (X1) -> Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	0.188	2.396	0.017	Signifikan
Profesionalisme (X2) -> Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	0.226	2.827	0.005	Signifikan
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y)-> Implementasi Tata Kelola di Sektor Publik (Z)	0.572	9.943	0.000	Signifikan

Berdasarkan tabel 4 Nilai koefisien e-Procurement (X1) terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) adalah 0,188 dengan nilai t hitung sebesar 2,396 dan p-value sebesar 0,017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel e-Procurement (X1) terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y). Artinya semakin meningkat e-Procurement (X1) maka semakin meningkat pula efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y). Pada variabel E-Procurement Francesco & Hastuti (2022) menyampaikan bahwa E-Procurement terbukti mempunyai pengaruh dengan arah yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa

Nilai koefisien profesionalisme (X2) terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) adalah 0,226 dengan nilai t hitung sebesar 2,827 dan p-value sebesar 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel profesionalisme (X2) terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y). Artinya semakin meningkat profesionalisme (X2) maka semakin meningkat pula efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y). Nilai koefisien integritas (X2) terhadap sistem pengadaan barang dan jasa (Y) adalah 0,132 dengan nilai t hitung sebesar 2,094 dan p-value sebesar 0,037. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel integritas (X2) terhadap sistem pengadaan barang dan jasa (Y). Indikator pada analisis tersebut yaitu adanya keterkaitan antara integritas dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dikatakan hipotesis kedua terbukti. Sejalan dengan pendapat Sopiyan *et al*, (2021) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa e-procurement dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/ jasa.

Nilai koefisien pada efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) terhadap implementasi Tata Kelola di Sektor Publik (Z) adalah 0,572 dengan nilai t hitung sebesar 9,943 dan p-value sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) terhadap Tata Kelola di Sektor Publik (Z). Artinya semakin meningkat efektivitas pengadaan barang dan jasa (Y) maka semakin meningkat pula implementasi Tata Kelola di Sektor Publik (Z). Indikator pada analisis tersebut yaitu adanya keterkaitan antara efektivitas pengadaan barang dan jasa terhadap implementasi tata kelola di sector

public. Hal ini selaras dengan pendapat Sopiyan *et al*, (2021) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa e-procurement dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/ jasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dianalisa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari akuntabilitas terhadap sistem pengadaan barang/jasa di sektor publik. Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara terhadap agen dimana menyatakan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan atau akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sistem pengadaan barang/jasa sektor publik mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Selain itu hasil analisa data sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel integritas terhadap sistem pengadaan barang dan jasa. Hasil wawancara peneliti terhadap agen dimana menyatakan bahwa prinsip integritas dimana menjunjung tinggi nilai etika seperti tidak melakukan manipulasi dan/atau persekongkolan sehingga menimbulkan fraud sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sistem pengadaan barang/jasa sektor publik mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan sangat penting dalam proses pengadaan barang/jasa di sektor publik mengingat banyak sekali godaan yang ditawarkan terhadap pelaku pengadaan.

Pada penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel transparansi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa. Selain itu hasil analisis data menunjukkan bahwa Sistem pengadaan barang dan jasa di sektor publik dapat dijelaskan oleh akuntabilitas, integritas dan transparansi sebesar 46% dan 54% lainnya dijelaskan oleh variable lain diluar penelitian. Implementasi Tata Kelola yang baik di sektor publik dapat dijelaskan oleh variabel Sistem pengadaan barang dan jasa di sektor publik sebesar 3,6% dan 96,4% lainnya dijelaskan variabel lain diluar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106-126.
- Aulia, E., Tambunan, K., & Laila, N. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 59-68.
- Butt, K. (2020). MSc in Logistics and Supply Chain Management Implication of E-Procurement System in a B2B Environment CSFs, Benefits, Challenges, Implementation Steps, Applications and Future Outl., (September 2019). doi: 10.13140/RG.2.2.16372.17289.
- Darmawan, I. (2022). Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi*. 15(2): 57-59.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237-243
- Kenneth Lysons, B. F. (2020) *Procurement and Supply Chain Management*, معرفت ادیان. Available at: <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.
- Mutangili, S. K. (2019) Influence of E-Procurement Practices on Supply Chain Performance: A Case Study of Kenya Airways. *Journal of Procurement & Supply Chain*, 3(2), pp. 1–16.

- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Pratama, S. S. (2022). Urgensi penerapan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 570-581.
- Poghosyan, S. et al. (2020). *Budgeting for the Sustainable Development Goals: Aligning domestic budgets with the SDGs*.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 222-243.
- Robbani, M. R., & Nadhif, F. F. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam Transparansi dan Kendala Pengelolaan Proyek Jalan Raya di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 570-584.